

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pembangunan di Indonesia hingga kini masih menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan berkelanjutan dari pemerintah. Ketimpangan ini tidak hanya mencakup perbedaan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Wilayah-wilayah seperti Jawa, Bali, dan sebagian Sumatra umumnya lebih maju dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam persebaran hasil pembangunan nasional.

Meskipun demikian, berbagai penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya celah dalam penelitian terkait ketimpangan pembangunan. Legionosuko *et al.* (2019) hanya menyoroti strategi nasional menghadapi perubahan iklim tanpa menganalisis dampaknya terhadap ketimpangan pembangunan. Harahap *et al.* (2022) membahas faktor ketimpangan pembangunan tetapi belum memasukkan aspek perubahan iklim dan mobilitas penduduk, serta hanya terbatas di Sumatera Utara. Damanik *et al.* (2018) fokus pada faktor ekonomi ketimpangan pendapatan di Jambi tanpa mempertimbangkan perubahan iklim atau migrasi.

Sementara itu, Rafly *et al.* (2023) membahas pengaruh globalisasi dan perubahan iklim pada ekonomi berkelanjutan namun belum secara khusus mengaitkan dengan ketimpangan pembangunan. Selain itu, Burzyński *et al.* (2022)

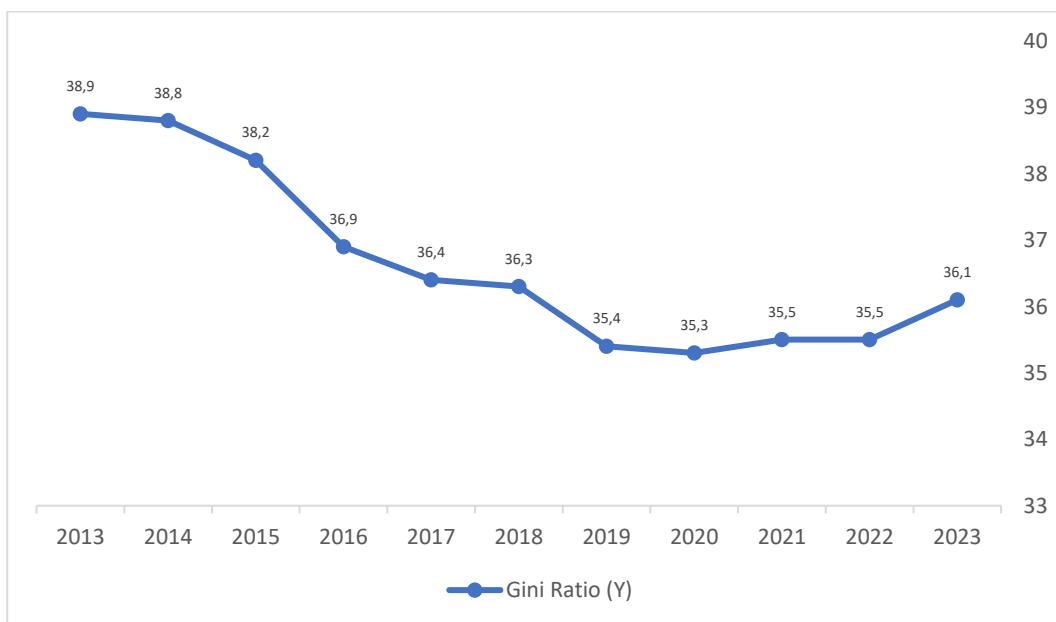
dan Martin *et al.* (2021) memang membahas hubungan perubahan iklim dengan migrasi dan ketimpangan, tetapi dalam konteks global atau negara lain, dan belum menguji kasus Indonesia secara empiris.

Salah satu indikator utama ketimpangan pembangunan yaitu ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan aspek krusial karena pendapatan mempengaruhi kemampuan individu atau kelompok dalam mengakses layanan dasar dan peluang ekonomi. Ketika ketimpangan pendapatan tinggi, kelompok berpendapatan rendah cenderung mengalami keterbatasan dalam memperoleh pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, tempat tinggal yang layak, serta transportasi yang menunjang produktivitas. Kondisi ini pada akhirnya memperburuk ketimpangan pembangunan dan memperbesar jurang sosial ekonomi antarwilayah. Memahami dan mengatasi ketimpangan pembangunan secara menyeluruh menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Wilayah yang lebih maju cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan lebih banyak kesempatan ekonomi, sedangkan wilayah tertinggal cenderung memiliki keterbatasan dalam hal pendapatan dan peluang pekerjaan. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam kualitas hidup dan kesejahteraan yang berkontribusi terhadap ketimpangan pembangunan secara keseluruhan. Untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pembangunan di Indonesia, salah satu indikator yang sering digunakan adalah Gini Ratio.

Gini Ratio menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tingginya Gini Ratio menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan signifikan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah maupun antar individu. Berikut merupakan angka gini ratio di Indonesia selama 10 tahun terakhir yaitu 2013-2023:



Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1. 1 Perkembangan Indek Gini Ratio

Berdasarkan grafik Gini Ratio di atas, ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia mengalami penurunan dari 39% pada 2013 ke titik terendah 35.3% pada 2019, menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Namun, sejak 2020 hingga 2023, Gini Ratio cenderung stabil di kisaran 35.3% hingga 35.5%, dengan sedikit peningkatan pada 2023 menjadi 36.1%, yang mengindikasikan adanya kenaikan ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir meskipun tidak signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa Gini Ratio Indonesia mengalami penurunan dari 39% pada 2013 menjadi 35,3% pada 2019, namun

stagnan dan sedikit meningkat hingga mencapai 36,1% pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan belum sepenuhnya teratas.

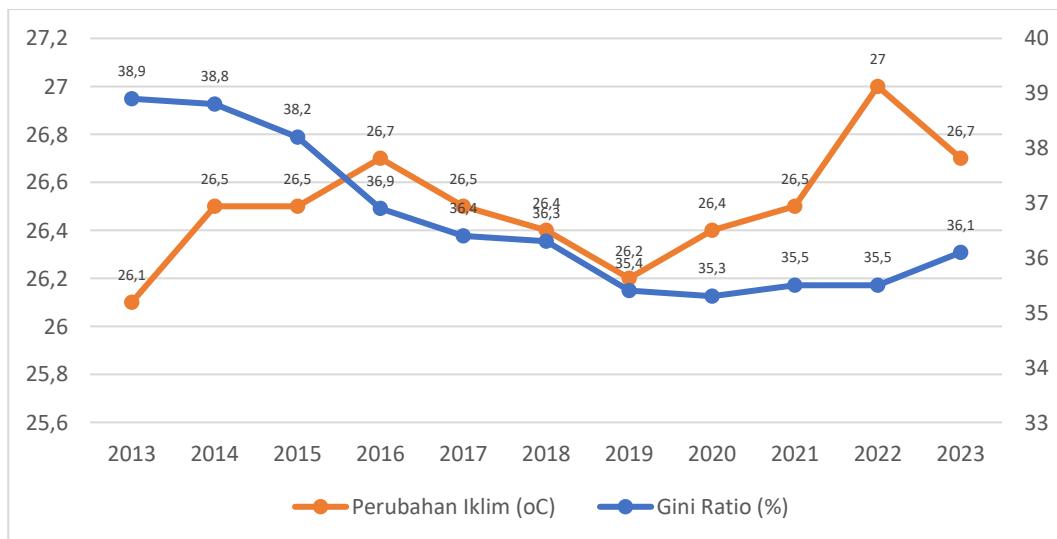
Perubahan iklim dan mobilitas penduduk adalah dua faktor yang turut memengaruhi ketimpangan pembangunan di Indonesia. Dampak perubahan iklim yang berbeda-beda di setiap wilayah membuat sebagian daerah lebih rentan terhadap risiko iklim ekstrem dibandingkan yang lain. Daerah pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan bencana alam cenderung memiliki tantangan pembangunan yang berbeda dibandingkan dengan daerah pedalaman.

Wilayah Jakarta Utara dan Semarang adalah contoh nyata dari dampak kenaikan permukaan laut di Indonesia. Daerah pesisir seperti Jakarta Utara dan Semarang menunjukkan kerentanan tinggi akibat kenaikan permukaan laut dan penurunan muka tanah. Fenomena banjir rob yang rutin terjadi di kawasan seperti Muara Baru dan Pluit di Jakarta Utara serta Tambak Lorok dan Kaligawe di Semarang tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan mendorong migrasi penduduk ke wilayah yang lebih aman. Dampak kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diperkirakan mencapai Rp544 triliun pada 2020–2024, yang mencakup sektor pesisir dan laut, pertanian, kesehatan, dan air (Bappenas; Tirto.id, 2024). Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan adaptif seperti pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi hutan, dan pengembangan energi terbarukan, ketimpangan antarwilayah akan terus melebar.

Ketimpangan pembangunan di Indonesia diperburuk oleh dampak perubahan iklim, yang tidak merata di berbagai wilayah. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tanpa intervensi kebijakan,

kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan mencapai sekitar Rp544 triliun selama periode 2020-2024. Kerugian ini tersebar di beberapa sektor, antara lain Sektor pesisir dan laut: Rp408 triliun, Sektor pertanian: Rp78 triliun, Sektor kesehatan: Rp31 triliun, Sektor air: Rp26 triliun. Namun, dengan penerapan kebijakan ketahanan iklim yang efektif, potensi kerugian ini dapat dikurangi hingga Rp281,9 triliun. Langkah-langkah mitigasi tersebut mencakup pengembangan energi terbarukan, rehabilitasi hutan, dan peningkatan infrastruktur hijau, (tirto.id, 2024).

Selain itu, wilayah pesisir dengan risiko kenaikan permukaan laut dan bencana alam lebih rentan mengalami stagnasi ekonomi dibandingkan wilayah lain yang secara geografis lebih terlindungi. Ketimpangan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular untuk memperkecil kesenjangan (katadata.co.id, 2022). Perkembangan suhu udaha dan indeks gini ratio di Indonesia yaitu sebagai berikut :



Sumber : BMKG, (2025); BPS, (2025)

Gambar 1. 2 Perubahan Iklim dan Indeks Gini Ratio Tahun 2013-2023

Berdasarkan data dalam kurun waktu 2013 hingga 2023, terlihat bahwa perubahan iklim yang diukur dari rata-rata suhu udara menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2022 sebesar 27°C. Sementara itu, ketimpangan pembangunan yang diukur melalui Gini Ratio menunjukkan tren penurunan dari 38,9% pada tahun 2013 menjadi 35,4% pada tahun 2019, kemudian cenderung stagnan dan sedikit meningkat hingga mencapai 36,1% pada tahun 2023.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear langsung antara perubahan iklim dan ketimpangan pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam hubungan keduanya, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan pembangunan, distribusi migrasi penduduk, maupun pola investasi wilayah. Jika dikaitkan dengan teori *Environmental Kuznets Curve* (EKC), peningkatan suhu udara sebagai indikator tekanan lingkungan belum sepenuhnya menunjukkan pola hubungan U terbalik terhadap ketimpangan. Begitu pula dari perspektif teori keberlanjutan, peningkatan suhu yang tidak diikuti oleh penurunan ketimpangan secara konsisten mencerminkan bahwa pembangunan yang terjadi belum sepenuhnya berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Perubahan iklim, termasuk peningkatan suhu rata-rata global, memiliki implikasi serius terhadap ketimpangan pembangunan. Wilayah yang lebih rentan terhadap dampak perubahan suhu, seperti daerah pesisir yang menghadapi kenaikan permukaan laut akibat mencairnya es kutub, atau wilayah dengan pola curah hujan yang semakin ekstrem, sering kali mengalami stagnasi bahkan penurunan kualitas

pembangunan. Sebagai contoh, daerah pesisir di Indonesia yang rentan terhadap bencana banjir dan erosi pantai mungkin menghadapi kerugian infrastruktur dan migrasi penduduk ke wilayah perkotaan. Di sisi lain, daerah yang lebih stabil secara geografis dapat terus berkembang tanpa menghadapi gangguan besar, sehingga memperbesar kesenjangan pembangunan antarwilayah. Fenomena ini menuntut perencanaan pembangunan yang lebih adil dengan mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

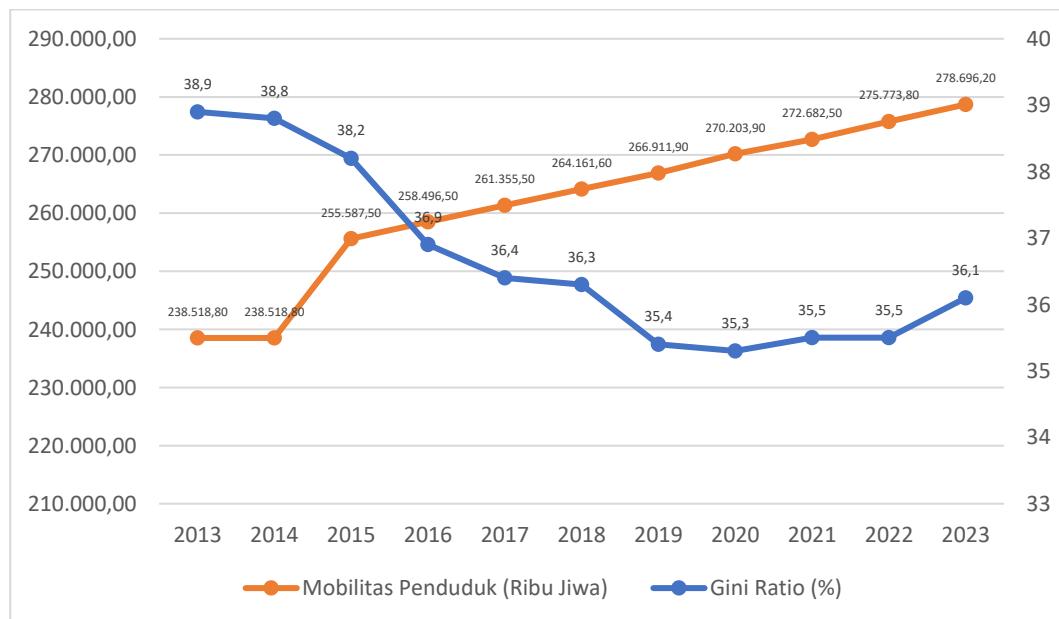
Selanjutnya mobilitas penduduk juga dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan. Mobilitas penduduk yang tinggi juga memengaruhi ketimpangan pembangunan. Misalnya, migrasi dari desa ke kota yang semakin tinggi dapat menyebabkan overpopulasi di kota besar, sementara daerah pedesaan kehilangan tenaga kerja produktif. Hal ini berdampak pada ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Migrasi yang intensif juga mengakibatkan kepadatan di perkotaan meningkat, sehingga kebutuhan akan perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan juga semakin tinggi. Wilayah-wilayah yang menjadi tujuan utama migrasi penduduk sering kali memperoleh perhatian lebih dalam pembangunan, sementara daerah-daerah asal yang ditinggalkan oleh penduduk mengalami kesenjangan.

Mobilitas penduduk, baik internal maupun lintas wilayah, memainkan peran penting dalam memengaruhi ketimpangan pembangunan di Indonesia. Menurut data BPS (2023), migrasi keluar dari wilayah pesisir seperti Jakarta Utara meningkat sebesar 7,62 % yang dipicu oleh banjir rob yang semakin parah. Hal serupa terjadi di Semarang, di mana sekitar 19.531 penduduk wilayah pesisir

pindah ke daerah pedalaman dalam dekade terakhir akibat dampak perubahan iklim.

Mobilitas ini sering dipicu oleh faktor ekonomi, urbanisasi, dan dampak perubahan iklim. Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan kerap menciptakan tekanan di wilayah tujuan, terutama dalam hal ketersediaan lapangan kerja, infrastruktur, dan layanan publik. Sementara itu, wilayah asal sering kali mengalami kekurangan tenaga kerja produktif, yang memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperburuk ketimpangan antarwilayah. Dalam lima tahun terakhir, pola migrasi internal di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, terutama ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, akibat dampak ekonomi dan bencana alam seperti banjir dan longsor.

Perkembangan jumlah penduduk indonesia selama beberapa tahun terakhir yaitu sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, (2025)

Gambar 1.3 Mobilitas Penduduk Indonesia

Data mobilitas penduduk dari tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari sekitar 238.518 jiwa menjadi 278.695 jiwa. Kenaikan ini mencerminkan intensitas migrasi yang semakin tinggi, baik migrasi masuk maupun keluar antarwilayah. Di sisi lain, Gini Ratio sebagai indikator ketimpangan pembangunan mengalami penurunan dari 38,9% pada tahun 2013 hingga mencapai titik terendah sebesar 35,3% pada tahun 2019, kemudian kembali mengalami sedikit peningkatan hingga mencapai 36,1% pada tahun 2023.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori migrasi Lewis dan teori *push-pull*. Dalam konteks ini, migrasi yang meningkat dapat disebabkan oleh adanya daya tarik (*pull factor*) dari wilayah-wilayah dengan peluang ekonomi dan pembangunan lebih baik, serta dorongan (*push factor*) dari daerah asal yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya atau tekanan sosial-ekonomi. Teori migrasi Lewis juga menekankan bahwa perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern dapat menjadi instrumen pengurangan ketimpangan. Namun, kenyataan bahwa ketimpangan tidak sepenuhnya menurun seiring mobilitas penduduk yang meningkat mengindikasikan bahwa migrasi belum sepenuhnya mampu menciptakan distribusi pembangunan yang merata.

Peningkatan mobilitas penduduk ini juga memberikan dampak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Daerah perkotaan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat karena adanya konsentrasi tenaga kerja dan peluang investasi. Sebaliknya, daerah pedesaan dan daerah terpencil sering kali tertinggal karena kekurangan sumber daya manusia produktif akibat migrasi keluar.

Hal ini menciptakan ketimpangan akses terhadap infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, sehingga memperparah kesenjangan pembangunan antarwilayah

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa perubahan iklim memiliki hubungan erat dengan ketimpangan pembangunan. Legionosuko *et al.* (2019) menyoroti bahwa strategi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim telah dirumuskan melalui koordinasi multisektor dalam bentuk Rencana Aksi Nasional, namun belum secara empiris mengkaji dampak perubahan iklim terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah. Sementara itu, Harahap *et al.* (2022) menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara, namun belum mempertimbangkan peran kebijakan pemerintah dan dinamika sosial-lingkungan secara luas.

Penelitian oleh Damanik *et al.* (2018) menunjukkan bahwa meskipun investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi, dan belum memasukkan variabel struktural seperti kualitas tenaga kerja. Di sisi lain, Rafly *et al.* (2023) menekankan bahwa globalisasi dan perubahan iklim dapat memperburuk ketimpangan ekonomi melalui gangguan terhadap sektor-sektor utama seperti pertanian dan perikanan, namun tidak menyertakan analisis empiris atau kajian sektoral yang lebih spesifik.

Burzyński *et al.* (2022) juga menambahkan bahwa perubahan iklim mendorong migrasi penduduk dari daerah rawan bencana ke wilayah lain, yang berpotensi memperdagam ketimpangan pembangunan, namun studi mereka belum menjelaskan bagaimana kebijakan adaptasi dapat mengurangi dampak tersebut

secara konkret. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, terlihat adanya celah penelitian untuk menganalisis secara empiris keterkaitan antara perubahan iklim dan ketimpangan pembangunan, serta efektivitas kebijakan mitigasi dan adaptasi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah rentan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang **“Pengaruh Perubahan Iklim dan Mobilitas Penduduk Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah perubahan iklim berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia?
2. Apakah mobilitas penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia?
3. Apakah perubahan iklim dan mobilitas penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh perubahan iklim terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia.

2. Mengetahui pengaruh mobilitas penduduk terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh perubahan iklim dan mobilitas penduduk terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan studi ketimpangan wilayah. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai keterkaitan antara tekanan lingkungan global dalam hal ini perubahan iklim dengan isu-isu struktural seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah. Temuan dari penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik yang masih relatif terbatas dalam menjelaskan bagaimana faktor-faktor ekologis dan kebijakan lingkungan berdampak terhadap distribusi pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan teori-teori baru mengenai peran variabel lingkungan sebagai determinan ketimpangan pembangunan serta pembangunan berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan yang relevan bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, maupun lembaga perencanaan dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah ancaman perubahan iklim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merancang kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim yang tidak hanya fokus pada aspek lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi seperti pengurangan ketimpangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah-wilayah rentan.